

**Daftar Inventarisasi Masalah**  
**Rancangan Peraturan Mahasiswa atas Perubahan Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 2 Tahun 2022**  
**tentang Pedoman Pembentukan Peraturan**



**SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TAHUN 2024**

### Daftar Inventarisasi Masalah

#### Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas Perubahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

| No | Indikator   | Permasalahan  | Penyelesaian   |
|----|-------------|---|--|
| 1. | Konsiderans | Dibutuhkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam membentuk Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa untuk menjamin peraturan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki daya guna dan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berkewajiban merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam sistem hukum Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017;</li><li>b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan yang terencana, terpadu, dan</li></ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>sistematis dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengarsipan dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa yang bermakna;</p> <p>c. bahwa Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mahasiswa mengenai aturan pembentukan peraturan yang baik dan tidak sesuai dengan perkembangan <i>student government</i> Universitas Diponegoro sehingga harus dirubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas</p> |
|--|--|--|---|

|    |                |  |   |
|----|----------------|--|---|
|    |                |  | Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.  |
| 2. | Dasar Hukum    | Eksistensi dan daya ikat dari PPO FH Undip 2018 sekarang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan empiris yang kini ada. Kondisi demikian didukung pula dengan pencabutan PPO di setiap fakultas melalui Musyawarah Mahasiswa Undip yang telah dilaksanakan di pertengahan tahun 2024. Pada pasal 4 PPO Universitas Diponegoro dijelaskan bahwa, <i>"Ormawa Undip berbentuk kesatuan dengan otonomi fakultas dan sekolah vokasi."</i> Dengan demikian, tidak ada konstitusi lain selain PPO Undip yang berlaku dalam lingkup fakultas/sekolah dan universitas. Dengan kata lain, yang wajib untuk dijadikan acuan Senat Mahasiswa FH Undip untuk membentuk produk hukum adalah Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 39A Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Perubahan Kedua;</li> <li>2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.</li> <li>3. Pasal 15 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.</li> <li>4. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan</li> </ol> |
| 3. | Ketentuan Umum | Untuk memudahkan penjelasan substansi materi dalam peraturan mahasiswa ini, maka definisi diperlukan dalam peraturan ini. Namun, masih   | Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>terdapat definisi yang belum dijelaskan dalam peraturan mahasiswa dan juga ada beberapa definisi yang sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan dalam peraturan mahasiswa ini. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan beberapa definisi mengenai beberapa hal, antara lain:</p> <p>a. Penambahan definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro</li> <li>- Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro</li> <li>- Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro</li> <li>- Mahasiswa</li> <li>- Komisi Terkait</li> <li>- Badan Legislasi.</li> <li>- Sidang Pleno</li> <li>- Sidang Paripurna</li> <li>- Daftar Inventarisasi Masalah</li> <li>- Pemantauan dan Peninjauan</li> </ul> | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan.</li> <li>2. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.</li> <li>3. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai PPO Undip adalah landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga</li> </ol> |
|--|--|---|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>Pemberian penjelasan yang tepat dan jelas agar dapat dipahami dengan baik maka perlu untuk diadakan pengkajian ulang mengenai beberapa penjelasan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya</li> <li>2. SM FH Undip</li> <li>3. BEM FH Undip</li> <li>4. UKM FH Undip</li> <li>5. BSO FH Undip</li> </ol> <p>Perlu dilakukan perubahan atas Pasal 2 yang menyatakan bahwa “PPO FH Undip merupakan aturan dasar dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan FH Undip.”</p> <p>Perlu dilakukan perubahan atas Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip dan Peraturan-Peraturan di bawahnya. “</p> | <p>kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Undip adalah haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.</li> <li>5. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma Universitas adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.</li> <li>6. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma FH Undip adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Fakultas</li> </ol> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Hukum Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li><li>8. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li><li>9. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan</li></ol> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.</p> <p>12. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum</p> |
|--|--|--|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BSO FH Undip adalah rintisan lembaga kemahasiswaan yang menaungi ruang lingkup tertentu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berada di bawah pembinaan BEM FH Undip.</p> <p>13. Mahasiswa adalah seorang atau kelompok orang yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.</p> <p>14. Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang yudikatif dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Undip.</p> <p>15. Program Legislasi yang selanjutnya disebut Proleg adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Mahasiswa FH Undip yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>16. Program Legislasi Serapan yang selanjutnya disebut Proleg Serapan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perma FH Undip yang berasal dari usulan eksternal SM FH Undip yang meliputi BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan/atau Mahasiswa</p> <p>17. Daftar Inventarisasi Masalah yang selanjutnya disebut DIM adalah naskah kajian mengenai permasalahan hukum serta solusi atas permasalahan tersebut yang berfungsi sebagai landasan disusunnya rancangan Perma FH Undip.</p> <p>18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Perma FH Undip sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>19. Materi Muatan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki.</p> <p>20. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan bersifat tetap SM FH Undip yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum SM FH dan bertanggungjawab atas proses pembentukan peraturan yang kewenangan pembentukannya menjadi milik SM FH Undip.</p> <p>21. Sidang Pleno adalah forum yang memuat pembahasan rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip yang telah berlaku yang diikuti oleh fungsionaris SM FH Undip dan/atau Mahasiswa</p> <p>22. Sidang paripurna adalah forum tertinggi pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut dilakukannya Sidang Pleno terhadap rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip yang telah berlaku.</p> <p>23. Komisi-komisi SM FH Undip yang selanjutnya disebut Komisi Terkait adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dari SM</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>FH Undip yang menaungi ruang lingkup tertentu dan memiliki mitra kerjanya masing-masing</p> <p>24. Pengarsipan adalah penempatan Peraturan yang dibentuk oleh SM FH Undip dalam arsip Peraturan secara elektronik</p> <p>25. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Perma FH Undip yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dalam yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Ormawa FH Undip dan Mahasiswa.</p> <p>Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“PPO Undip merupakan aturan dasar dalam Peraturan Ormawa FH Undip.”</p> <p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai</p> |
|--|--|--|---|

|     |                              |   |   |
|-----|------------------------------|---|---|
|     |                              |   | <p>berikut:</p> <p>“Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip.”</p>   |
| 4 . | Hak, Wewenang, dan Kewajiban | <p>Suatu peraturan pada dasarnya ditujukan supaya dapat membagi hak dan kewajiban adresat hukumnya secara adil dan jelas, Permasalahannya, dalam Perma P3 ini belum ada ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai hak dan wewenang dari setiap Ormawa FH Undip. Oleh sebab itu, sangat mungkin Ormawa yang satu dengan Ormawa yang lain memiliki pandangan yang kabur dalam upaya menggunakan haknya.</p> | <p>Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IA<br/>HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN</p> <p>Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 3A, 3B, 3C, 3D, dan Pasal 3E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1A</p> <p>(1) SM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan Proleg;</li> <li>b. membentuk Perma FH Undip dari mulai tahapan perencanaan hingga tahapan pengarsipan sesuai dengan</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>ketentuan dalam Peraturan ini guna dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Mahasiswa, Ormawa FH Undip, dan Dekanat FH Undip;</p> <p>c. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan SM FH Undip; dan</p> <p>d. menerima dan menindaklanjuti usulan permohonan pengujian Perma FH Undip sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) SM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip;</p> <p>b. mengadakan dan mengundang Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi pada seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip;</p> <p>c. mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa dalam proses penyusunan Proleg Serapan;</p> <p>d. mempertimbangkan usulan dan masukan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa dalam seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip; dan</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>e. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa</p> <p>Pasal 3B</p> <p>(1) BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BEM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan BEM FH Undip;</li><li>b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip dalam seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;</li><li>c. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;</li><li>d. mengajukan rancangan Perma FH</li></ul> |
|--|--|--|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Undip kepada SM FH Undip;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. mengajukan usulan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan</li><li>f. mendapatkan informasi secara berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.</li></ul> <p>(2) BEM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BEM FH Undip;</li><li>b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Perma FH Undip yang diadakan oleh SM FH Undip;</li><li>c. mengawasi pelaksanaan peraturan</li></ul> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada BEM FH Undip; dan</p> <p>d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3C</p> <p>(1) UKM FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh UKM FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan UKM FH Undip masing-masing;</p> <p>b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;</p> <p>c. memberikan usulan kepada SM FH</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;</p> <p>d. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;</p> <p>e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan</p> <p>f. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.</p> <p>(2) UKM FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh UKM FH Undip;</p> <p>b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Perma FH Undip yang diadakan oleh SM FH Undip;</p> <p>c. mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada UKM FH Undip terkait; dan</p> <p>d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3D</p> <p>(1) BSO FH Undip memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BSO FH Undip dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan BSO FH Undip dan mendapat persetujuan dari BEM FH Undip;</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>b. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis;</li><li>c. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;</li><li>d. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;</li><li>e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan</li><li>f. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip.</li></ul> <p>(2) BSO FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan</li></ul> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada BSO FH Undip;</p> <p>b. turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Peraturan yang diadakan oleh SM FH Undip melalui BEM FH Undip;</p> <p>c. mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan oleh BSO FH Undip; dan</p> <p>d. menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3E</p> <p>(1) Mahasiswa memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>secara lisan dan/atau tertulis;;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan;</li><li>c. mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip;</li><li>d. mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip; dan</li><li>e. mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip..</li></ul> <p>(2) Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun DIM, Naskah Akademik, rancangan Perma FH Undip dan dokumen-dokumen lainnya yang berasal dari Proleg Serapan yang sebelumnya telah diajukan oleh Mahasiswa terkait; dan</li><li>b. mematuhi dan melaksanakan</li></ul> |
|--|--|--|--|

|    |                  |  |   |
|----|------------------|--|---|
|    |                  |  | ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip.   |
| 5. | Asas Pembentukan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas keterbukaan yang tercantum dalam Pasal 4 perlu untuk disesuaikan dan diberikan penekanan lebih lanjut bahwa perlu dilakukan secara aktif. Dari mulai proses perencanaan proleg hingga proses pengarsipannya, ada kewajiban untuk SM FH Undip agar selalu bersifat aktif menanyakan segala kebutuhan dan pandangan dari mitra kerja/konstituen. Dalam hal ini tentu keterbukaan yang dimaksud merupakan proses aktif yang berusaha menjangkau segala pihak, dan bukan merupakan keterbukaan yang pasif.</li> <li>- Dalam Pasal 4 Perma FH Undip NomoR 2 Tahun 2022 masih belum terdapat penjelasan atas asas pembentukan peraturan yang baik, yakni tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat</li> </ul> | <p>Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dalam membentuk Peraturan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan yang baik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> <li>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>f. kejelasan rumusan; dan</li> <li>g. keterbukaan aktif.</li> </ul> <p>Ditambahkan penjelasan atas Pasal 4 dan Pasal 5</p> |



|    |                                    |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|
|    |                                    | <p>pembentuk peraturan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan aktif.</p>  | <p>sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan atas pasal.</p>  |
| 5. | Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan | <p>Dalam Pasal 6, masih terdapatnya pengakuan atas Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Peraturan Dekan, Keputusan Dekan, PPO FH Undip, dan Keputusan Senat Mahasiswa. Di mana, 4 peraturan dan 2 keputusan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi yang sekarang ada dan tidak lagi diakui dalam Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023. Sementara itu, terdapat ketidaksesuaian antara “bersifat mengikat umum” sebuah peraturan dengan ruang lingkup peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang diatur. Secara empiris, peraturan internal yang dimiliki oleh Ormawa FH Undip hanya mengikat secara internal, sehingga tidak memenuhi sifat mengikat umum dari definisi peraturan yang ada.</p> | <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPO Undip;</li> <li>b. GBHK Undip;</li> <li>c. Perma Universitas</li> <li>d. Perma FH Undip</li> </ol> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> |

|    |                                    |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|
| 6. | Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan tentang peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya tidak memenuhi definisi dari peraturan yang “mengikat umum” sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum, sehingga perlu disesuaikan.</li> </ul>  | Ketentuan Pasal 7 dihapus.   |
| 7. | Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 masih ditemui nomenklatur penyebutan PPO FH Undip yang mana sudah tidak relevan dan tidak diakui di dalam Perma P3 Univ. Sedangkan untuk pengakuan PPO Undip sendiri belum ditemukan dan dicantumkan</li> <li>2. Pasal 8 belum memberikan kedudukan kepada Perma Undip untuk dapat memberikan perintah kepada Perma FH Undip agar dapat menyusun materi muatan lebih lanjut.</li> <li>3. Diperlukan penyesuaian norma dalam Pasal 9</li> </ol> | <p>Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Materi muatan yang harus diatur dengan Perma FH Undip berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPO Undip dan/atau Perma Universitas;</li> <li>b. perintah suatu Perma Universitas dan/atau Perma FH Undip untuk diatur dengan Perma FH Undip;</li> <li>c. penyelenggaraan otonomi fakultas dan menampung kondisi khusus fakultas; dan/atau</li> </ol> |

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
|    |                                    |   | <p>d. pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.</p> <p>Ketentuan Pasal 9 dhapus.</p>   |
| 8. | Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan | <p>Dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 belum ada ketentuan mengenai sanksi seperti apa yang dapat diterapkan, sehingga perlu untuk ditambahkan batasan sanksi. Sebab, tanpa adanya sanksi, peraturan hukum tentu tidak mempunyai daya ikat yang baik terhadap pihak yang diatur di dalamnya. Selain itu, kecenderungan seseorang untuk melanggar hukum pastilah lebih dapat diminimalisir dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan.</p> | <p>Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Jenis sanksi yang dapat diterapkan sebagai materi muatan dalam Perma FH Undip terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi anggaran; dan atau</li> <li>b. sanksi administrasi.</li> </ul> <p>(2) Sanksi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah berupa pemotongan sejumlah anggaran dan/atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang dapat diterapkan terhadap Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah berupa pemberian peringatan secara lisan dan/atau tertulis terhadap Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa</p> <p>(4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara bertahap.</p> <p>(5) Penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perma FH Undip wajib memperhatikan tujuan dari pembentukan Perma FH Undip terkait dan kesanggupan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa selaku adresat hukum.</p> |
|--|--|--|---|

|    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| 9. | Perencanaan Perma FH Undip | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Pasal 10 ayat (3) belum terdapat pengakuan bahwa Perma Undip dapat memberikan perintah kepada SM F untuk dapat membentuk Perma Fakultas.</li> <li>- Perlu untuk dicantumkan secara jelas bahwa SM FH Undip dalam membentuk Proleg perlu untuk memperhatikan usulan dari Ormawa FH Undip.</li> <li>- Dalam menyusun Proleg juga perlu untuk melihat kebelakang dan melakukan analisis tentang Proleg-Proleg yang belum selesai.</li> <li>- Belum ada ketentuan mengenai wadah apa yang dapat digunakan SM FH Undip untuk dapat menetapkan Proleg.</li> <li>- Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Perma FH Undip di luar Proleg.</li> <li>- Perlu untuk dicantumkan ketentuan bahwa SM FH Undip perlu untuk mensosialisasikan bakal Proleg SM FH Undip.</li> </ul> | <p>Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Perma FH Undip dilakukan dalam Proleg.</p> <p>(2) Proleg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Perma FH Undip.</p> <p>(3) Dalam penyusunan Proleg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perma FH Undip didasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah PPO Undip;</li> <li>b. Perintah Perma Universitas dan/atau Perma FH Undip lainnya; dan/atau</li> <li>c. aspirasi dan kebutuhan hukum di dalam ruang lingkup mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.</li> </ul> <p>Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
|----|----------------------------|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan penyesuaian nomenklatur “Badan Legislasi” dalam proses pembentukan peraturan.</li> <li>- Belum ada ketentuan lanjutan tentang Proleg Serapan yang dibicarakan dalam Perma Universitas Nomor 7 Tahun 2023.</li> <li>- Belum ditemukannya ketentuan yang mengatur tentang bagaimana proses pengajuan usulan bakal Rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa untuk dimasukkan dalam Proleg Serapan.</li> <li>- Belum ditemukan bentuk usulan pasti yang dapat diberikan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam pengajuan bakal rancangan Proleg Serapan.</li> <li>- Belum adanya pengaturan tentang tindak lanjut usulan bakal rancangan Perma FH Undip yang diusulkan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.</li> </ul> | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Proleg memuat program pembentukan Peraturan dengan judul rancangan Peraturan, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya..</p> <p>(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</li> <li>b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan</li> <li>c. jangkauan dan arah pengaturan.</li> </ul> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> |
|--|--|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(1) Penyusunan Proleg dilaksanakan oleh SM FH Undip.</p> <p>(2) Penetapan Proleg dilakukan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) periode kepengurusan SM FH Undip.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Proleg dilakukan pada awal masa kepengurusan SM FH Undip dan/atau waktu lain maksimal pada triwulan kedua.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyusunan Proleg dikoordinasikan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.</p> <p>(2) Sebelum menyusun Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip melakukan evaluasi terhadap Proleg SM FH Undip pada kepengurusan sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam menyusun Proleg sebagaimana</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mempertimbangkan hasil Pemantauan dan Peninjauan Perma FH Undip pada kepengurusan sebelumnya.</p> <p>(4) Dalam menyusun Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mempertimbangkan usulan dan masukan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa.</p> <p>(5) Usulan BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui sosialisasi, rapat dengar pendapat, atau medium lain yang wajib diselenggarakan oleh SM FH Undip.</p> <p>Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A hingga Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
|--|--|--|---|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>(1) Penyusunan Proleg Serapan dilaksanakan oleh SM FH Undip berdasarkan usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.</p> <p>(2) Penetapan Proleg Serapan dilakukan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) periode kepengurusan SM FH Undip.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Proleg Serapan dilakukan bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Proleg sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3).</p> <p>(4) Usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. landasan filosofis;</li><li>b. data empiris;</li><li>c. keterkaitan dengan peraturan lainnya;</li><li>dan</li><li>d. daftar permasalahan rancangan Peraturan.</li></ul> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(5) Ormawa FH Undip dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan lampiran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Keputusan Dekanat FH Undip tentang kepengurusan Ormawa FH Undip terkait;</li><li>b. Surat Keputusan Ormawa FH Undip terkait tentang nama dan Nomor Induk Mahasiswa yang akan menjadi pihak penyusun rancangan Perma FH Undip;</li><li>c. surat pernyataan kesanggupan Ormawa FH Undip terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip; dan</li><li>d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait.</li></ol> <p>(6) Mahasiswa dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib menyertakan lampiran berupa:</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>a. identitas dan kartu tanda Mahasiswa yang bersangkutan;</li><li>b. surat pernyataan kesanggupan Mahasiswa terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip;</li><li>c. data dukung berupa persetujuan Mahasiswa selain Mahasiswa pemberi usulan; dan</li><li>d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait.</li></ul> <p>(7) Data dukung berupa persetujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c setidaknya-tidaknya berjumlah 20 (dua puluh) Mahasiswa dengan memuat nama lengkap, nomor induk Mahasiswa terkait, dan tandatangan.</p> <p>(8) Usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dikirimkan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut tentang sistematika usulan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13B</p> <p>(1) Pemeriksaan dan pertimbangan atas usulan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A ayat (8) wajib dilakukan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.</p> <p>(2) Pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. verifikasi kebenaran data lampiran;</li></ul> <p style="text-align: center;">dan</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>b. pengujian atas materi usulan.</p> <p>(3) Verifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan serangkaian mekanisme yang berfungsi untuk memperoleh keabsahan atau keaslian data lampiran yang telah disusun oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait dengan tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pencocokan data;</li><li>b. wawancara pihak yang bersangkutan; dan/atau</li><li>c. uji publik.</li></ul> <p>(4) Pengujian atas materi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan serangkaian mekanisme yang berfungsi untuk mengetahui kualitas usulan yang diberikan oleh Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dengan tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. rapat dengar pendapat;</li><li>b. konsultasi publik; dan/atau</li></ul> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>c. pengkajian serta telaah materi usulan dengan literatur ilmiah.</p> <p>Pasal 13C</p> <p>(1) Tindak lanjut atas pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13B ayat (1) oleh SM FH Undip berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penolakan sementara; atau</li><li>b. penerimaan</li></ol> <p>(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penjelasannya disampaikan kepada Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait melalui surat elektronik.</p> <p>(3) Dalam hal penolakan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh SM FH Undip, Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait wajib melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan penjelasan yang diberikan.</p> <p>(4) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pada ayat (1) huruf b diberikan oleh SM FH Undip, usulan dari Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait dinyatakan diterima.</p> <p>(5) Dalam hal penolakan sementara diberikan dan Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait tidak melakukan perbaikan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kurun waktu yang telah ditentukan, usulan dari Ormawa FH Undip atau Mahasiswa terkait dinyatakan ditolak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13D</p> <p>(1) Pembahasan hasil penyusunan Proleg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Proleg Serapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dilaksanakan melalui Sidang Pleno dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna.</p> <p>(2) Hasil Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>dicantumkan dalam surat keputusan SM FH Undip.</p> <p>(3) Surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. judul rancangan Perma FH Undip;</li><li>b. pihak penyusun setiap rancangan Perma FH Undip; dan</li><li>c. keterangan waktu lini masa pembentukan Perma FH Undip.</li></ul> <p style="text-align: center;">Pasal 13E</p> <p>Dalam keadaan tertentu, SM FH Undip dapat mengajukan rancangan Perma FH Undip di luar Proleg mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan atau kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa;</li><li>b. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa;</li></ul> |
|--|--|--|---|



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | <p>c. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip; dan/atau</p> <p>d. pemenuhan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Perma FH Undip secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.</p> |
| 10. | Tahap Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya | - Diperlukan penyesuaian untuk Pasal 14 | Ketentuan Pasal 14 dihapus.  |

|     |                           |  |   |
|-----|---------------------------|--|---|
| 11. | Penyusunan Perma FH Undip | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Pasal 15 belum terdapat legitimasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam pengajuan rancangan Perma FH Undip.</li> <li>2. Perlu diatur mengenai ketentuan naskah akademik, diperlukannya juga ketentuan mengenai sistematika teknik penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah.</li> <li>3. Diperlukan pengaturan terhadap penambahan hak dan wewenang Ormawa FH Undip dan Mahasiswa untuk mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip</li> <li>4. Perlu dilakukan pembaharuan atas konsepsi sistematika naskah akademik, yakni menyangkut bab “kajian teoritis dan praktik empiris” yang dirasa sangat diperlukan sebagai landasan dalam menyusun Perma FH Undip.</li> <li>5. Perlu ditambahkan ketentuan tentang rancangan Perma FH Undip yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dan Mahasiswa.</li> </ol> | <p>Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rancangan Perma FH Undip dapat berasal dari SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa.</li> <li>(2) Rancangan Perma FH Undip yang berasal dari SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa harus disertai dengan DIM dan Naskah Akademik.</li> <li>(3) Ketentuan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan untuk Rancangan Perma FH Undip tentang pencabutan Perma FH Undip.</li> </ol> <p>Di antara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan DIM Rancangan Perma FH Undip dilakukan menurut ketentuan penyusunan DIM.</li> </ol> |
|-----|---------------------------|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(2) Ketentuan penyusunan DIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini.</p> <p>Ketentuan angka 2 hingga angka 7 Lampiran I Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini</p> <p>Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rancangan Perma FH Undip dari SM FH Undip yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik diajukan oleh fungsionaris SM FH Undip, Komisi Terkait, alat kelengkapan SM FH Undip, atau gabungan alat kelengkapan SM FH Undip.</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, pematapan, dan sosialisasi konsepsi rancangan Perma FH Undip dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.</p> <p>Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) Rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik disusun oleh tim atau bidang yang membawahi urusan pembentukan Perma FH Undip.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH FH Undip dilakukan oleh tim atau bidang yang membawahi urusan pembentukan Perma FH Undip.</p> <p>(3) Rancangan Perma FH Undip dari Mahasiswa yang disertai dengan DIM dan Naskah Akademik disusun oleh Mahasiswa terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13A ayat</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(6).</p> <p>(4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perma FH Undip dari Mahasiswa dilakukan oleh Mahasiswa terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13A ayat (6) dengan dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18B</p> <p>(1) Rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dikirimkan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik sesuai dengan waktu lini masa yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13D ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal penyusun rancangan Perma FH Undip adalah Ormawa FH Undip, surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat rancangan Perma FH Undip juga memuat surat tugas Ormawa FH Undip.</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(3) Surat tugas Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang pemberian kewajiban kepada anggota Ormawa FH Undip terkait untuk melakukan pembahasan rancangan Perma FH Undip bersama dengan SM FH Undip.</p> <p>(4) Dalam hal penyusun rancangan Perma FH Undip adalah Mahasiswa, surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat rancangan Perma FH Undip juga memuat surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembahasan rancangan Perma FH Undip bersama dengan SM FH Undip.</p> <p>(5) SM FH Undip membahas rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak rancangan Perma FH Undip diterima.</p> |
|--|--|--|--|

|     |                             |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 12. | Teknik penyusunan peraturan | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="629 212 1279 770">1. Diperlukan perubahan atas bentuk rancangan Perma FH Undip bagian tanda-tangan. Di mana hasil Rapat Dengar Pendapat pada pertengahan bulan yang lalu menyebutkan bahwa tanda tangan ketua BEM FH Undip sebagai perwakilan lembaga kemahasiswaan di bidang eksekutif perlu dibubuhkan dalam Perma FH Undip agar ketentuan di dalamnya lebih mempunyai daya ikat dan terdapat proses "<i>checks and balance</i>".</li></ol> | Ketentuan Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini. |
|-----|-----------------------------|--|--|

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 13. | Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip | <p>Tahap Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai tindak lanjut dari akan diberikannya hak pengusulan rancangan Perma FH Undip kepada BEM FH Undip, maka harus diatur pula mekanisme pembahasannya.</li> <li>2. Belum adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana pembahasan tingkat 1 dilakukan tentu dapat menimbulkan ketidakjelasan makna. Misalnya mengenai perbedaan rapat alat kelengkapan biasa dengan rapat alat kelengkapan yang khusus membahas mengenai rancangan peraturan mahasiswa FH Undip.</li> <li>3. Kemudian, agar animo mahasiswa terhadap proses pembentukan peraturan berkembang, maka perlu juga untuk menambah dan memberikan wadah kepada mereka untuk dapat ikut serta tidak hanya secara tidak langsung, namun juga secara langsung dalam pembahasan peraturan.</li> </ol> | <p>Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembahasan rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh SM FH Undip.</li> <li>(2) Dalam hal rancangan Perma FH Undip berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, SM FH Undip wajib mengikutsertakan anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait dalam pembahasan rancangan Perma FH Undip.</li> <li>(3) Keikutsertaan anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam pembahasan rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan guna memberikan penjelasan atas materi muatan dalam rancangan Perma FH Undip yang dibahas.</li> <li>(4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembahasan rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat</li> </ol> |
|-----|--|---|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>4. Diperlukan mekanisme baru untuk meningkatkan animo Mahasiswa dan agar Perma FH Undip betul-betul dapat merepresentasikan kebutuhan hukum Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.</p> <p>Tahap Pengesahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Perma P3 yang berlaku masih belum jelas, siapa pimpinan yang dapat menandatangani/ mengesahkan rancangan Perma FH Undip.</li> <li>2. Agar Perma FH Undip yang disahkan lebih mengikat, penandatanganan juga dilakukan oleh Ketua BEM FH Undip.</li> <li>3. Belum adanya mekanisme yang jelas apabila terdapat kesalahan rujukan pasal setelah disahkannya peraturan mahasiswa.</li> </ol> | <p>(2) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.</p> <p>Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengantar pembicaraan;</li> <li>b. pembahasan DIM dan/atau Rancangan Perma FH Undip; dan</li> <li>c. penyampaian pendapat dan tanya jawab</li> </ol> <p>(2) Pengantar pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi mengenai penjelasan secara garis besar tentang Rancangan Perma FH Undip yang sedang dibahas.</p> <p>(3) Pembahasan DIM dan/atau Rancangan Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(1) huruf (b) dapat dilakukan melalui pemaparan poin-poin DIM, penjelasan materi muatan yang akan diatur, dan/atau perbandingan Rancangan Perma FH Undip dengan Perma FH Undip sebelumnya.</p> <p>(4) Penyampaian pendapat dan tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan tingkat I.</p> <p>(5) Dalam pembicaraan tingkat I, SM FH Undip dapat mengundang pihak-pihak di luar SM FH Undip jika materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Perma FH Undip yang sedang dibahas berkaitan dengan pihak tersebut.</p> <p>Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan bilamana rancangan Perma FH Undip terkait</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>telah melalui proses sosialisasi dan/atau rapat dengar pendapat yang secara akumulatif dihadiri oleh setidaknya 3% dari jumlah Mahasiswa secara keseluruhan.</p> <p>(2) Jumlah Mahasiswa secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada data total Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.</p> <p>(3) Dalam hal belum terpenuhinya syarat jumlah kehadiran sebanyak 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa selaku penyusun rancangan Perma FH Undip dapat melakukan sosialisasi dan/atau rapat dengar pendapat tambahan.</p> <p>(4) Dalam hal telah terpenuhinya syarat jumlah kehadiran sebanyak 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan tingkat II dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib sidang SM FH Undip.</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25A</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikoordinasikan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan Perma FH Undip berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, SM FH Undip wajib mengirimkan surat undangan kepada Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait paling lambat 7 (tujuh) hari dari waktu pelaksanaan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan oleh SM FH Undip melalui surat elektronik.</p> <p>(4) Anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait sebagaimana dimaksud pada (2) mempunyai hak untuk menyampaikan saran, penjelasan, pertanyaan,</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>dan/atau masukan atas rancangan Perma FH Undip dalam pembicaraan tingkat II.</p> <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh fungsionaris SM FH Undip.</p> <p>(2) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diberikan oleh fungsionaris SM FH Undip.</p> <p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Rancangan Perma FH Undip yang telah diberi persetujuan oleh fungsionaris SM FH Undip dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c disahkan</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>dalam Sidang Paripurna dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip.</p> <p>(2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib sidang SM FH Undip.</p> <p>(3) Rancangan Perma FH Undip yang telah ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada BEM FH Undip untuk ditandatangani oleh Ketua BEM FH Undip.</p> <p>(4) Penandatanganan Rancangan Perma FH Undip oleh Ketua BEM FH Undip dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.</p> <p>(5) Dalam hal Ketua BEM FH Undip tidak menandatangani Rancangan Perma FH Undip dalam jangka waktu 14 hari sejak dikirimkannya Rancangan Perma FH Undip kepada BEM FH Undip, Rancangan Perma FH Undip tersebut sah menjadi Perma FH Undip.</p> <p>Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal Rancangan Perma FH Undip yang telah dikirimkan kepada BEM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, Badan Legislasi melakukan perbaikan dengan melibatkan pihak penyusun rancangan Perma FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Ketua SM FH Undip.</p> <p>(3) Dalam hal telah diberikannya persetujuan Ketua SM FH Undip terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perma FH Undip terkait dikirimkan kembali kepada BEM FH Undip.</p> |
|--|--|--|---|

|     |             |   |   |
|-----|-------------|---|---|
| 14. | Pengarsipan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan beberapa penyesuaian penggunaan untuk diksi “alat kelengkapan SM FH Undip yang khusus menangani bidang legislasi” menjadi “Badan Legislasi”</li> <li>- Ditemukan kesalahan rujukan pasal dalam Pasal 33</li> <li>- Belum ada bentuk pengarsipan yang pasti untuk Peraturan SM FH Undip, sehingga dibutuhkan kejelasan mengenai bentuk dan media pengarsipan yang dilakukan. Belum adanya ketentuan mengenai apa apa saja yang diarsipkan (apakah hanya draft peraturannya saja, atau dim juga termasuk, atau naskah akademik pula)</li> </ul> | <p>Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pengarsipan Peraturan dalam Arsip Peraturan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Badan Legislasi.</p> <p>Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Penyebarluasan Proleg dan Rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh Anggota SM FH Undip beserta Badan Legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs web SM FH Undip dan/atau media sosial SM FH Undip</p> <p>(3) Situs web SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.</p> <p>Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
|-----|-------------|---|---|



|     |                          |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|
|     |                          |  | <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Penyebarluasan Perma FH Undip yang telah diarsipkan dalam Arsip Peraturan SM FH Undip dilakukan oleh Anggota SM FH Undip.</p>   |
| 15. | Pengujian Perma FH Undip | <p>Sebagai tindak lanjut dari disahkannya suatu Perma FH Undip, maka perlu hadirnya kesiapan sarana dalam pengujian Perma FH Undip sendiri dengan Perma Undip dan/atau PPO Undip. Hal inilah yang menjadi polemik kekosongan hukum selama beberapa tahun terakhir, sehingga hadirnya pengujian Perma FH Undip melalui mekanisme <i>judicial review</i> dan <i>legislative review</i> dirasa menjadi jawaban yang tepat dalam mengisi kekosongan aturan tersebut.</p> | <p>Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XA<br/>PENGUJIAN PERMA FH UNDIP</p> <p>Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C dan Pasal 40D sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40A</p> <p>(1) Pengujian Perma FH Undip dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa; atau</li> <li>b. pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(2) Pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan menurut ketentuan di luar Peraturan ini.</p> <p>(3) Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40B</p> <p>(1) Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40A ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk Perma FH Undip yang telah berlaku.</p> <p>(2) Pengujian Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Legislasi.</p> <p>(3) Ruang lingkup Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Perma FH Undip yang dianggap tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan sesuai dengan Peraturan</li></ol> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>yang berlaku; dan/atau</p> <p>b. Perma FH Undip yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagiannya dianggap bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.</p> <p>Pasal 40C</p> <p>(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Perma FH Undip, yaitu :</p> <p>a. Mahasiswa; atau</p> <p>b. Ormawa FH Undip</p> <p>(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangannya yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> <p>Pasal 40D</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(1) Pengujian Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40A ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tahap pengajuan;</li><li>b. tahap pengujian; dan</li><li>c. tahap tindak lanjut.</li></ul> <p>(2) Tahap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40C ayat (2) oleh pemohon kepada SM FH Undip.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring melalui surat elektronik SM FH Undip.</p> <p>(4) Tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penerimaan permohonan oleh SM FH Undip;</li><li>b. pengkajian dan analisis permohonan oleh Badan Legislasi;</li><li>c. penyusunan hasil pengkajian dan</li></ul> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>analisis permohonan oleh Badan Legislasi dalam bentuk kajian hasil pengujian Perma FH Undip; dan</p> <p>d. pelaporan dan pembahasan kajian hasil pengujian Perma FH Undip secara bersama oleh Badan Legislasi dan Komisi Terkait;</p> <p>(5) Pengkajian dan analisis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang memiliki kaitan dengan objek permohonan.</p> <p>(6) Tahap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyampaian kajian hasil pengujian Perma FH Undip oleh Badan Legislasi dalam Sidang Pleno untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan melalui Sidang Paripurna.</p> <p>(7) Kajian hasil pengujian Perma FH Undip yang telah ditetapkan melalui Sidang Paripurna wajib ditindaklanjuti oleh SM FH Undip</p> |
|--|--|--|--|

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
|     |                           |  | (8) Kajian hasil pengujian Perma FH Undip disampaikan kepada pemohon secara daring melalui surat elektronik SM FH Undip.   |
| 16. | Pemantauan dan Peninjauan | <p>Demi memberikan rasa kemanfaatan dan daya guna sebuah peraturan, proses penegakan aturan hukum tidak hanya berakhir pada disahkannya sebuah peraturan saja. Agar peraturan yang sudah disahkan mampu betul-betul berjalan sesuai dengan target/tujuan yang diharapkan, lembaga pembentuk peraturan idealnya melihat secara langsung terhadap pelaksanaan di lingkup sosial. Sebab, tanpa adanya proses demikian, peraturan yang berlaku seolah-olah dianggap sebagai peraturan yang ideal dan jauh dari kata kurang. Inilah alasan mengapa di samping adanya pemberian hak kepada Ormawa FH Undip dan/atau mahasiswa untuk mengajukan usul pengujian Perma FH Undip, SM FH Undip secara langsung melakukan pemantauan dan peninjauan. Dengan itu, proses pemantauan dan peninjauan juga perlu diatur.</p> | <p>Di antara BAB XA dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XB sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XB<br/>PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN<br/>PERMA FH UNDIP</p> <p>Di antara Pasal 40D dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40E, Pasal 40F, dan Pasal 40G sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40E</p> <p>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip dilakukan setelah Perma FH Undip berlaku.</p> <p>(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SM FH Undip dan</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.</p> <p>(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan Sidang Pleno dan ketetapan Sidang Paripurna di awal tahun kepengurusan.</p> <p>(4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Proleg tahun selanjutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40F</p> <p>Ruang lingkup Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kesesuaian antara materi muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau Peraturan yang lebih tinggi;</li><li>b. kesesuaian materi muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris</li></ol> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>yang ada; dan</p> <p>c. kesesuaian antara materi muatan Peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan materi muatan Perma FH Undip terkait.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40G</p> <p>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tahap perencanaan;</li><li>b. tahap pelaksanaan; dan</li><li>c. tahap kesimpulan dan rekomendasi.</li></ul> <p>(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembentukan dan penetapan panitia kerja atau penunjukkan alat kelengkapan SM FH Undip sebagai panitia pelaksana Pemantauan dan Peninjauan;</li><li>b. penentuan linimasa dan waktu</li></ul> |
|--|--|--|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pelaksanaan; dan</p> <p>c. pembuatan kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait</p> <p>(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyampaian hasil kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait kepada Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait;</p> <p>b. pemberian masukan oleh Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait terhadap kajian awal;</p> <p>c. perbaikan dan pemantapan kajian awal atas masukan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan</p> <p>d. pelaporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait dalam Sidang Pleno untuk</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>diambil keputusan.</p> <p>(4) Tahap kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait kepada Sidang Paripurna untuk disahkan dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip; dan</li><li>b. pemberian hasil Pemantauan dan Peninjauan kepada kepengurusan SM FH Undip selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan Proleg.</li></ul> <p>(5) Ketentuan mengenai penyusunan laporan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> |
|--|--|--|---|

|     |                       |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|
| 17. | Partisipasi Mahasiswa | <p>Dalam peraturan yang berlaku, masih ditemui beberapa ketentuan yang kurang lengkap mengenai bagaimana partisipasi mahasiswa dapat dilaksanakan. Memang bentuknya sudah dicantumkan, yakni secara lisan/tulisan, namun melihat kepada kondisi yang sekarang ada, mekanisme daring/luring juga menjadi salah satu pertimbangan.</p> <p>Selanjutnya, ditemukan pula belum adanya hak bagi mahasiswa untuk dipertimbangan usulannya dan hak bagi mahasiswa untuk diberi penjelasan atas usulan telah disampaikan.</p> | <p>Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Mahasiswa dan Ormawa FH Undip berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam seluruh tahapan Pembentukan Peraturan.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring/luring melalui medium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat;</li> <li>b. sosialisasi;</li> <li>c. diskusi;</li> <li>d. kunjungan kerja; dan/atau</li> <li>e. medium lain yang ditentukan oleh lembaga pembentuk Peraturan.</li> </ol> <p>(3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan pertimbangan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan oleh lembaga pembentuk Peraturan.</p> |
|-----|-----------------------|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(4) Untuk memudahkan penyampaian masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Peraturan harus dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.</p> <p>(5) Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip berhak mendapat penjelasan oleh lembaga pembentuk Peraturan atas hasil dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Penjelasan oleh lembaga pembentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui medium:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. rapat dengar pendapat;</li><li>b. sosialisasi;</li><li>c. diskusi; dan/atau</li><li>d. medium lain secara tertulis.</li></ol> |
|--|--|--|---|